



# Risalah Kebijakan

Nomor 13, Agustus 2021

## MENGELOLA KERAGAMAN PESERTA DIDIK PASCAZONASI

### Ringkasan

- Penerapan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi berdampak terhadap keragaman latar belakang peserta didik. Perubahan itu umumnya terjadi di sekolah-sekolah yang berlabel unggulan dan berlokasi di tengah kota.
- Keragaman terjadi dalam hal kemampuan akademik, latar belakang ekonomi, agama, etnis atau kedaerahan, serta keberadaan siswa dengan status Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Keragaman itu berdampak terhadap proses pembelajaran, kedisiplinan, pergaulan antarsiswa, serta interaksi antara siswa dan guru.
- Beberapa sekolah telah berupaya mengelola keragaman peserta didik pasca-kebijakan zonasi. Namun, dukungan dari pemerintah dan pemerintah daerah tetap diperlukan untuk mendampingi dan memfasilitasi sekolah dan guru agar meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola keragaman peserta didik.



## Konteks

Sistem zonasi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah-sekolah di Indonesia telah mengalami beberapa perkembangan. Berdasarkan urutan regulasi, sistem tersebut dimulai dengan implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 17 Tahun 2017. Pada 2018, Permendikbud No. 14 Tahun 2018 diterbitkan, disusul dengan Permendikbud No. 51 Tahun 2018. Pada tahun ajaran 2019/2020, sistem zonasi dalam PPDB dilakukan berdasarkan Permendikbud No. 20 Tahun 2019. Tidak berselang lama, terbit Permendikbud No. 44 Tahun 2019 sebagai dasar pelaksanaan PPDB tahun 2020. Ada beberapa perbedaan dari setiap Permendikbud tersebut, namun utamanya terletak pada persentase kuota di setiap kategori jalur masuk PPDB.

Dalam pelaksanaannya, sistem zonasi sering memicu polemik. Penerapan sistem zonasi dimaksudkan untuk menyediakan layanan pendidikan yang bermutu dan merata. Hal tersebut dimungkinkan karena dengan implementasi PPDB berbasis zonasi berdasarkan domisili calon siswa, status “sekolah favorit” yang selama ini disandang sekolah-sekolah tertentu, akan berkurang dan diiringi upaya pemerataan kualitas di setiap sekolah (PDSPK, 2018). Dengan semangat pemerataan ini, sekolah-sekolah “dipaksa” untuk menerima peserta didik baru berdasarkan kriteria dan kuota tertentu yang sudah ditentukan oleh Permendikbud yang berlaku. Zonasi atau jarak tempat tinggal calon siswa dengan sekolah yang dituju merupakan kriteria dan dasar utama yang menentukan apakah siswa diterima atau tidak di sebuah sekolah. Implikasinya, sistem zonasi dalam PPDB berpotensi memberikan peluang pada semakin beragamnya siswa di suatu sekolah. Keragaman tersebut dapat terjadi pada aspek prestasi akademik, status sosial, serta latar belakang ekonomi dan kesejahteraan keluarga. Hal ini terjadi karena komposisi siswa di suatu sekolah mencerminkan keragaman masyarakat yang berdomisili di wilayah di mana sekolah berada. Berbeda ketika sistem zonasi belum diterapkan, komposisi siswa cenderung homogen karena seleksi didasarkan pada prestasi akademik dan mencerminkan status sosial-ekonomi tertentu.

Penelitian mengenai PPDB, termasuk PPDB sistem zonasi, telah banyak dilakukan. Berbagai literatur menunjukkan bahwa masih ada kekurangan dalam implementasi PPDB berbasis zonasi (Adiputra et al., 2019; Azhari & Suryanef, 2020; Bintoro, 2018; Marini & Utoyo, 2019; Muammar, 2019; Pangaribuan & Hariyati, 2019), meskipun ada juga peningkatan dalam implementasinya di daerah-daerah tertentu (Purwanti et al., 2018, 2019). Namun, kajian mengenai kondisi keragaman dan strategi pengelolaan keragaman siswa di sekolah pascaimplementasi PPDB berbasis zonasi, belum banyak menjadi perhatian. Pusat Penelitian Kebijakan mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan penelitian yang bertujuan memberikan rekomendasi terkait strategi pengelolaan keragaman siswa di sekolah selepas sistem zonasi diterapkan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dari kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) secara daring, dengan menghadirkan perwakilan 17 SMA negeri dari berbagai daerah di Indonesia. Sekolah-sekolah tersebut dipilih untuk melihat kondisi sekolah-sekolah yang berlokasi di kota besar dan kecil, serta berstatus “unggulan” dan “non-unggulan”. Penelitian ini berlangsung sejak Juni hingga Oktober 2020.

## Sistem zonasi berpengaruh pada perubahan keragaman siswa, terutama di sekolah-sekolah unggulan di kota besar.

Implementasi PPDB berbasis zonasi tidak berpengaruh terhadap perubahan keragaman peserta didik di sekolah-sekolah non-unggulan dan berlokasi di pinggiran kota. Sekolah-sekolah tersebut tidak banyak merasakan perubahan karakteristik siswa, karena sebelum sistem zonasi diterapkan, sekolah sudah terbiasa menerima siswa yang tinggal tidak jauh dari lokasi sekolah. Beberapa sekolah non-unggulan merasa bahwa setelah penerapan PPDB berbasis zonasi, peserta didik di sekolah mereka cenderung menjadi homogen, khususnya dalam hal kemampuan akademik, serta latar belakang ekonomi keluarga. Di sekolah-sekolah nonunggulan, karakteristik para siswa mencerminkan kondisi masyarakat yang tinggal di wilayah zonasi sekolah, yaitu masyarakat

dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Setelah penerapan sistem zonasi, sekolah-sekolah tersebut merasa kehilangan siswa-siswa yang memiliki kemampuan akademik awal relatif tinggi yang banyak berasal dari wilayah luar zonasi.

Hal sebaliknya justru terjadi pada sekolah berlabel unggulan yang biasanya berada di pusat kota. Pascazonasi, sekolah merasakan adanya perubahan karakteristik siswa, utamanya pada aspek kemampuan akademik, latar belakang ekonomi, agama, etnis atau kedaerahan, dan keberadaan siswa berkebutuhan khusus. Dalam hal kemampuan akademik, sebelum penerapan sistem zonasi, sekolah-sekolah berlabel unggulan berisi siswa dengan kemampuan akademik di atas rata-rata, sementara pascazonasi kemampuan awal peserta didik sangat bervariasi. Dalam hal latar belakang ekonomi, sebelum penerapan sistem zonasi, beberapa sekolah unggulan banyak diisi oleh kalangan menengah ke atas, sedangkan selepas penerapan sistem zonasi, latar belakang ekonomi siswa menjadi lebih beragam. Sebagai gambaran, sebelum diterapkannya zonasi, hampir seluruh siswa di suatu sekolah unggulan di Jakarta memiliki *handphone* dan laptop. Namun, ketika sistem zonasi diterapkan, kondisi kepemilikan perangkat tersebut menjadi lebih beragam.

Dari aspek agama, sebelum era zonasi, beberapa sekolah unggulan hampir tidak pernah memiliki siswa dari agama minoritas tertentu. Hal tersebut karena anak-anak dari keluarga dengan agama minoritas ada kalanya tidak memiliki kemampuan akademik yang baik sehingga tidak memenuhi syarat masuk ke sekolah unggulan, salah satunya dari nilai ujiannya. Selepas sistem zonasi diterapkan dalam PPDB, siswa beragama minoritas tertentu dapat masuk sekolah unggulan terdekat dengan rumah mereka. Contohnya, dari hasil diskusi terungkap, para siswa beragama Sikh dapat masuk ke sebuah SMA negeri unggulan di Kota Medan melalui jalur zonasi, karena berdomisili di wilayah zona sekolah tersebut. Hal itu tidak terjadi ketika sistem zonasi belum diterapkan, mengingat kebanyakan siswa beragama Sikh tidak cukup berprestasi untuk masuk ke sekolah tersebut.

Perubahan keragaman juga terjadi dalam aspek etnisitas atau kedaerahan. Sebelum era zonasi, etnis minoritas tertentu di suatu daerah tidak biasa masuk ke suatu sekolah yang ada di wilayah tempat tinggalnya karena terhambat prestasi akademik yang biasanya dikaitkan dengan nilai ujian nasional. Sistem zonasi dalam PPDB menyebabkan siswa dari etnis minoritas tersebut dapat masuk ke sekolah terdekat dengan tempat tinggal siswa. Di salah satu SMA di Kota Makassar, misalnya, sebelum diterapkannya zonasi, hanya berisi siswa dari etnis Bugis-Makassar. Selepas diterapkannya zonasi, sekolah tersebut menerima siswa pendatang dari Nusa Tenggara Timur yang tinggal di wilayah zonasinya.

Jumlah siswa dengan status ABK juga dirasakan sebagai salah satu perubahan keragaman peserta didik pascazonasi. Sebelum era zonasi, beberapa sekolah inklusi telah menerima siswa berstatus ABK, namun dengan jumlah yang tidak banyak. Penerapan sistem zonasi dalam PPDB menyebabkan penambahan jumlah siswa ABK di sekolah tersebut, mengingat di beberapa kota/kabupaten telah menentukan secara spesifik kuota jalur inklusi dalam PPDB. Sebagai gambaran, seorang guru di salah satu SMA negeri di Kota Bandung menyatakan bahwa setiap tahun dipastikan ia mengajar siswa berstatus ABK, padahal sebelumnya hanya sesekali saja dalam beberapa tahun ajaran.

### **Penerapan sistem zonasi dalam PPDB berdampak pada perubahan dalam pembelajaran, kedisiplinan, pergaulan antarsiswa, serta interaksi guru-siswa.**

Perubahan keragaman peserta didik pascazonasi di sekolah berdampak terhadap beberapa aspek, yaitu: pembelajaran, kedisiplinan, pergaulan antarsiswa, serta interaksi siswa dan guru. Dalam hal pembelajaran, beberapa sekolah merasakan dampak dari lebih beragamnya kemampuan akademik peserta didik hasil PPDB berbasis zonasi. *Pertama*, pencapaian target pembelajaran membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan ketika siswa memiliki kemampuan akademik yang cenderung homogen atau di atas rata-rata.

*Kedua*, perubahan motivasi belajar siswa. Sebelum era zonasi, umumnya siswa berkemampuan akademik tinggi dan memiliki motivasi belajar yang juga tinggi. Zonasi menyebabkan motivasi belajar siswa menjadi lebih bervariasi mengingat kemampuan akademik siswa yang juga beragam. Penurunan motivasi belajar siswa juga terjadi selepas zonasi, sehingga ada indikasi kelas menjadi kurang kompetitif. Keragaman latar belakang ekonomi siswa juga berdampak terhadap pembelajaran. Kebijakan belajar dari rumah menyebabkan siswa dengan ekonomi rendah tidak optimal mengikuti pembelajaran daring karena keterbatasan akses dan perangkat digital yang dimiliki.

*Ketiga*, kedisiplinan siswa di sekolah juga sedikit banyak terdampak. Beberapa sekolah merasakan permasalahan dengan adanya siswa dengan kemampuan akademik yang rendah. Sekolah mengistilahkan para siswa seperti itu sebagai “siswa yang susah diatur” yang berdampak pada peningkatan pelanggaran tata tertib sekolah, seperti membolos dan berkelahi di sekolah. Siswa juga berpotensi berkelompok sesuai dengan kemampuan akademisnya.

Selain dampak negatif, penerapan sistem zonasi dalam PPDB juga memberikan implikasi positif. *Pertama*, bertumbuhnya persaingan positif antarsiswa untuk meningkatkan kompetensi akademik masing-masing. *Kedua*, siswa lebih aktif dalam berkomunikasi dan berinteraksi. *Ketiga*, tumbuhnya empati serta sikap saling menghargai dan toleransi di antara para siswa, salah satunya karena pergaulan mereka yang lebih luas khususnya dengan teman yang memiliki latar belakang yang berbeda.

### **Berbagai strategi pengelolaan keragaman dilakukan oleh sekolah agar pembelajaran tetap berjalan dengan optimal.**

Menyikapi dampak perubahan keragaman peserta didik pascazonasi, sekolah melakukan beberapa strategi pengelolaan keragaman. Pengelolaan keragaman itu dipilah berdasarkan aspek-aspek keragaman peserta didik yang muncul pascaimplementasi PPDB berbasis zonasi, yaitu kemampuan akademik, latar belakang ekonomi, agama dan kebudayaan (termasuk di dalamnya etnis dan kedaerahan), serta status ABK.

*Pertama*, untuk mengelola keragaman peserta didik dalam aspek kemampuan akademik, beberapa sekolah melakukan intervensi terhadap aspek pembagian kelas, guru, kurikulum, ekstrakurikuler, metode pembelajaran, dan tata tertib. Beberapa sekolah melakukan identifikasi berdasarkan kemampuan awal siswa, yaitu siswa berkemampuan awal tinggi dan siswa berkemampuan awal rendah. Identifikasi tersebut diimplementasikan dalam pembagian kelas. Sekolah membuat kelas-kelas tertentu yang diisi oleh para siswa berkemampuan awal tinggi dan kelas-kelas tertentu yang diisi oleh para siswa berkemampuan awal rendah. Tujuan dari identifikasi tersebut untuk menjaga mutu akademik sekolah. Harapannya, siswa dengan kemampuan awal tinggi dapat meningkatkan prestasinya, sementara siswa dengan kemampuan awal rendah dapat mengejar ketertinggalan akademik mereka. Meskipun begitu, ada juga sekolah yang menerapkan kebijakan membagi rata siswa ke dalam kelas tanpa kategori tertentu dan sengaja membuat kelas menjadi beragam. Ini bertujuan untuk menyediakan ruang pertemuan bagi para siswa dengan berbagai karakteristik.

Sekolah juga berupaya meningkatkan kompetensi, kepekaan, dan motivasi guru mengajar agar dapat menjalankan tugas dengan lebih baik. Mengelola siswa dengan keragaman tertentu merupakan tantangan yang tidak mudah. Diperlukan keterampilan teknis dan motivasi lebih pada guru mengingat setiap siswa membutuhkan intervensi yang berbeda dalam pembelajaran. Selain pelibatan guru dalam kegiatan peningkatan kompetensi, seperti seminar, lokakarya, ataupun bimbingan teknis, sekolah juga mendorong guru melakukan refleksi pembelajaran setiap harinya. Ada pula beberapa sekolah yang memfasilitasi pertemuan guru dalam rangka evaluasi pembelajaran. Untuk meningkatkan motivasi para guru, ada sekolah-sekolah yang mengundang pakar untuk memberi suntikan motivasi kepada para guru. Sekolah juga mendorong peran guru Bimbingan dan Konseling (BK) serta wali kelas dalam menangani

berbagai dinamika yang terjadi pascaimplementasi PPDB berbasis zonasi. Di beberapa sekolah, peningkatan peran wali kelas dilakukan salah satunya dengan mengatur penugasan wali kelas, yang biasanya melibatkan guru berusia lebih muda dan memahami teknologi.

Beberapa sekolah juga melakukan strategi yang bersifat kurikuler, misalnya melalui penyelenggaraan program *remedial teaching* dan peninjauan kriteria ketuntasan minimal (KKM). Penyelenggaraan program ini dilakukan dengan strategi sekolah membentuk klinik bimbingan siswa atau program konsolidasi belajar yang ditujukan untuk memfasilitasi kebutuhan bantuan dalam belajar. Khusus untuk program konsolidasi belajar, para siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar diarahkan untuk mampu mengidentifikasi kesulitannya dan kemudian berkonsultasi kepada teman dan/atau gurunya. Dalam pelaksanaannya, program-program seperti itu bisa berupa pembukaan kelas-kelas tambahan atau kunjungan guru-guru ke rumah siswa. Peninjauan KKM dilakukan karena adanya rentang kemampuan akademik yang cukup jauh antara siswa berkemampuan awal rendah dan siswa berkemampuan awal tinggi, sehingga diperlukan penyesuaian.

Sekolah-sekolah memahami bahwa kemampuan akademik bukanlah satu-satunya potensi peserta didik yang dapat ditumbuhkembangkan. Prestasi peserta didik dapat pula dikembangkan melalui bidang ekstrakurikuler. Oleh karena itu, beberapa sekolah memilih menambah jenis ekstrakurikuler untuk memfasilitasi minat dan bakat siswa yang mungkin secara akademik rendah, namun berpotensi diarahkan dalam bidang nonakademik.

Menyadari adanya keragaman dalam kemampuan akademik para siswanya, sekolah-sekolah juga melakukan penyesuaian dalam strategi pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Di kelas, guru didorong untuk lebih menerapkan metode pembelajaran variatif. Sedangkan di luar kelas, dilakukan intensifikasi program tutor sebaya.

Sementara itu, untuk menunjang proses pembelajaran di kelas dan kehidupan sekolah yang kondusif, beberapa sekolah melakukan penyempurnaan tata tertib sekolah. Upaya ini juga dilakukan untuk mempertegas peraturan sekolah agar para siswa yang berkemampuan awal rendah dan cenderung “susah diatur” dapat dibina dengan baik. Hal tersebut diperlukan mengingat pelanggaran terhadap kedisiplinan sekolah dalam kadar tertentu berhubungan dengan kemampuan akademik siswa serta kelancaran proses pembelajaran.

*Kedua*, dalam rangka mengelola keragaman peserta didik pascazonasi dalam aspek latar belakang ekonomi, beberapa sekolah memberlakukan pembebasan atau keringanan SPP bagi siswa tidak mampu. Selain itu, dalam pelaksanaan BDR, beberapa sekolah juga memberikan bantuan kuota internet dan meminjamkan telepon seluler atau komputer tablet serta menyediakan laboratorium komputer bagi siswa yang terkendala kepemilikan perangkat-perangkat tersebut untuk pembelajaran.

*Ketiga*, untuk pengelolaan keragaman peserta didik pascazonasi dalam aspek agama dan kebudayaan termasuk etnis dan kedaerahan, beberapa sekolah menjalin kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil (misalnya yayasan atau lembaga swadaya masyarakat) untuk mendapatkan pendampingan dalam pengelolaan keragaman. Salah satunya, beberapa sekolah mendapatkan pendampingan dalam program “Sekolah Damai” yang digagas oleh Wahid Foundation. Selain itu, beberapa sekolah juga berusaha untuk memenuhi hak para peserta didik dalam mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agamanya masing-masing dengan cara menyediakan guru pendidikan agama yang sesuai. Strategi ini utamanya diterapkan pada sekolah yang sebelum penerapan sistem zonasi tidak terbiasa menerima siswa dengan latar belakang agama tertentu karena faktor akademik (memiliki nilai ujian nasional rendah).

*Keempat*, untuk mengelola keragaman peserta didik pascazonasi dalam aspek siswa berkebutuhan khusus, sekolah-sekolah memfasilitasi para gurunya untuk mengikuti berbagai kegiatan pengembangan kompetensi yang biasanya diselenggarakan oleh dinas pendidikan, seperti pelatihan, lokakarya, bimbingan teknis, atau seminar mengenai pendidikan inklusi.



**Gambar 1** Strategi Pengelolaan Keragaman yang Dilakukan Sekolah

## Rekomendasi

Berangkat dari berbagai temuan di atas, tulisan ini merekomendasikan hal-hal sebagai berikut.

### 1. Mempertahankan sistem PPDB berbasis zonasi untuk menjamin pemerataan pendidikan.

Kajian ini telah menunjukkan bahwa PPDB berbasis zonasi telah membuka kesempatan bagi setiap anak untuk mengakses layanan pendidikan terdekat dengan tempat tinggalnya, terlepas dari latar belakang akademik dan status sosial-ekonomi mereka. Hal ini memungkinkan hadirnya keragaman peserta didik dalam banyak aspek. Dengan kata lain, PPDB telah berkontribusi terhadap pemerataan pendidikan.

### 2. Pendampingan dan fasilitasi kepada sekolah dan guru untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola keragaman peserta didik.

Pelatihan yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek maupun dinas pendidikan perlu menekankan materi tentang keragaman peserta didik, dampaknya, serta strategi pengelolaannya, baik di level sekolah maupun level kelas (guru). Selain itu, diperlukan pula kerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat sipil yang selama ini telah bergerak dalam isu pengelolaan keragaman di dunia pendidikan, terutama keragaman dalam aspek non-akademik.

### 3. Dokumentasi dan diseminasi praktik baik pengelolaan keragaman yang telah dilakukan sejumlah sekolah dan guru.

Mengelola keragaman peserta didik lebih mudah diteorikan daripada dipraktikkan. Oleh karena itu, pemerintah dan pemerintah daerah perlu mendokumentasikan praktik baik pengelolaan keragaman di berbagai sekolah dan mendiseminasikannya untuk menjadi inspirasi dan contoh bagi sekolah dan guru lainnya. Memberikan contoh-contoh empiris semacam ini sering kali lebih efektif dibandingkan aturan atau panduan karena sekolah dan guru juga dapat mempelajari konteks dari setiap praktik, sehingga dapat menyesuaikan dengan kapasitas dan kondisi mereka.

## Daftar Pustaka

- Adiputra, A. R., Karsidi, R., & Haryono, B. (2019). Cultural lag dalam program penerimaan peserta didik baru (PPDB) online dengan sistem zonasi tahun 2018 di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sukoharjo. *Habitus: Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Antropologi*, 3(1), 1-13. Retrieved from <https://jurnal.uns.ac.id/habitus/issue/view/2364>
- Azhari, A., & Suryanef. (2020). Pelaksanaan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020 di Kota Padang. *Journal of Civic Education*, 2(5), 390-396.
- Bintoro, R. F. A. (2018). Persepsi masyarakat terhadap implementasi kebijakan zonasi sekolah dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMA tahun ajaran 2017/2018 di Kota Samarinda. *Jurnal Riset Pembangunan*, 1(1), 48-57.
- Marini, K., & Utoyo, B. (2019). Menimbang kembali kebijakan sistem zonasi: Studi penerimaan peserta didik baru di Bandar Lampung. *Administrativa*, 1(1), 87-100.
- Muammar. (2019). Problematika Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi di sekolah dasar (SD). *El-Midad: Jurnal PGMI*, 11(1), 41-60. Retrieved from <http://journal.uinmataram.ac.id/index.php/elmidad%0AVol>.
- Pangaribuan, E. N., & Hariyati, N. (2019). Implementasi kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru jenjang SMP di Kabupaten Gresik. *Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 7(1), 1-12.
- PDSPK. (2018). *Sistem zonasi: Strategi pemerataan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan*. Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan.
- Purwanti, D., Irawati, I., & Adiwisastro, J. (2018). Efektivitas kebijakan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi bagi siswa rawan melanjutkan pendidikan. *Dinamika*, 5(4), 1-7.
- Purwanti, D., Irawati, I., Adiwisastro, J., & Bekti, H. (2019). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi Di Kota Bandung. *Jurnal Governansi*, 5(1), 12-23. <https://doi.org/10.30997/jgs.v5i1.1699>
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). *Gambaran sekolah inklusif di Indonesia: Tinjauan Sekolah Menengah Pertama. Gambaran Sekolah Inklusif Di Indonesia*. Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Retrieved from [http://publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi\\_14D0F106-F4EE-486B-A74F-84A191B4AD25\\_.pdf](http://publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_14D0F106-F4EE-486B-A74F-84A191B4AD25_.pdf)
- Puslitjakdikbud. (2017). *Evaluasi implementasi PPDB sistem zonasi tahun 2017*. Jakarta.
- Suhadi. (2016). Pengantar: Kreativitas guru dalam mengelola keragaman di sekolah. In Suhadi, L. K. Pary, F. M. Imamah, & M. Tahun (Eds.), *Mengelola keragaman di sekolah: Gagasan dan pengalaman guru* (pp. iii-viii). Yogyakarta: CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies) Universitas Gadjah Mada.



**Risalah Kebijakan** ini merupakan hasil dari penelitian/kajian yang dilakukan oleh **Pusat Penelitian Kebijakan**

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi: **Pusat Penelitian Kebijakan**

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi  
Kompleks Kemdikbud-Ristek, Gedung E, Lantai 19  
Jl. Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270  
Telp. 021-5736365, 5713827

**Tim Penyusun**

**Herman Hendrik  
Mikka W. Nurrochsyam  
Romeyn P. Putra  
Yunita Murdiyningrum**

